

Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan

Mulyani, Julita br Silalahi

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma

Email: diajeng.mulyani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan PP No 60 Tahun 2008 pada BPBD kota Medan pada kurun waktu 2017-2021. BPBD Kota Medan mengalami kenaikan jumlah anggaran antara 3%-29% karenanya pengendalian internal terhadap proses pengeluaran kas menjadi hal yang harus diperhatikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian ini menjelaskan sistem pengendalian internal pada BPBD Kota Medan sudah baik, hal ini terlihat dari penghitungan data yang didapat hasilnya menunjukkan persentase hingga 80%. Ketidaksesuaian sebesar 20% terjadi karena tidak terdapat pemisahan fungsi penerimaan dan pengeluaran kas di BPBD Kota Medan. Hal ini terjadi karena kekhasan karakteristik organisasi BPBD Kota Medan yang tidak memiliki sumber pendapatan lain selain dari alokasi anggaran APBD Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instansi perlu meningkatkan pengendalian internal kas sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian di BPBD berjalan baik dengan menenpatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Peneliti menyarankan agar pimpinan instansi dapat mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk para pegawai sehingga pengendalian kas berjalan dengan efektif sesuai peraturan yang berlaku.

Kata kunci: *Pengendalian Internal; PP No.60 Tahun 2008; Pengeluaran Kas*

Abstract

The aims of this study is to analyse the implementation of internal control of cash expenditure at BPBD Medan in accordance with PP No. 60 Year 2008. In 2017-2021, budget allocation for BPBD Medan is increasing almost to 29%. This condition need a consideration in term of internal control over the cash. Observations and interviews showed that the rate of internal control implementation in accordance with PP No. 60 year 2008 up to 80%. Incompability in remain 20% occurred because of there is no separation of cash receipt and cash expenditure. This condition is due to the uniqueness of BPBD Medan that do not have any income resources except from budget allocation of APBD Medan city. This study found that institutions need to inhance internal control of cash in accordance with regulations. Furthermore, the environment

Muliyani, Julita br Silalahi

Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan

control at BPBD is relatively good because the positioning of employee eas accordance with their competencies. This study suggested top management to allocate a sufficient budget for training and education.

Keywords: *Internal Control, PP No.60 Year 2008, Cash Expenditure*

Pendahuluan

Setiap pengeluaran dan penerimaan kas harus dilakukan secara baik. Artinya jangan sampai instansi/organisasi kekurangan uang kas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Kekurangan uang kas untuk memenuhi kewajiban akan berakibat hilangnya atau pudarnya kepercayaan pihak luar terhadap organisasi/instansi tersebut. Penerimaan dan pengeluaran kas harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kas merupakan salah satu harta yang paling lancar, dapat segera digunakan, mudah berpindah tangan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Dalam pelaksanaan manajemen kas sangat diperlukan sebuah sistem pengendalian internal yang baik untuk menghindari kerugian perusahaan. Untuk memudahkan proses manajemen kas, perusahaan perlu menyusun sebuah sistem pengendalian internal.

Pada organisasi publik/ pemerintahan, sistem pengendalian internal diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Penelitian terkait pengendalian internal kas di pemerintah daerah telah banyak dilakukan (Hikmah, 2018) dan (Kaligis, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal terhadap penerimaan kas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan Kota Bitung telah berjalan baik dan sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nariswari, 2018) menunjukkan bahwa pengendalian internal pada restoran R&B Grill belum berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari pemegang kas kecil dan kas besar masih dipegang oleh petugas yang sama dan rekonsiliasi bank tidak dilaksanakan oleh bagian keuangan. Selanjutnya (Fanola, 2018) mendapati bahwa penerapan

pengendalian internal kas pada PT. Bintika Bangunnusa Medan belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari unsur struktur organisasi perusahaan yang belum tersusun secara lengkap dan jelas yaitu dengan masih terdapatnya rangkap pekerjaan oleh bagian kasir yaitu pencatatan dan pembayaran kas, dapat diartikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal kas pada PT. Bintika Bangunnusa Medan masih belum sesuai dengan prosedur dan prinsip yang baik dan benar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah khususnya di kota Medan. Kas merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya pelaksanaan tugas. Setiap tahun pemerintah Kota Medan memberikan anggaran kepada BPBD kota Medan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugasnya, besaran anggaran yang diterima BPBD pada kurun lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Anggaran BPBD Kota Medan 2017 s/d 2021

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	% kenaikan
1	2017	Rp. 10.849.032.140	5 %
2	2018	Rp. 11.601.056.866	7 %
3	2019	Rp. 12.982.116.485	12 %
4	2020	Rp. 16.710.696.149	29 %
5	2021	Rp. 17.283.393.410	3 %

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa antara tahun 2017 s/d 2021 BPBD memperoleh kenaikan anggaran antara 3% sampai 29%. Peningkatan jumlah anggaran menunjukkan bertambahnya dana yang harus dikelola oleh BPBD Kota Medan, dan meningkatnya tuntutan untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel dengan pengendalian internal yang memadai. Dengan pengendalian internal kas yang baik maka transparansi dari transaksi keuangan, menghindari penyalahgunaan kas pada manajemen, untuk mendukung produktivitas instansi untuk mengetahui seberapa besarkah pelaksanaan pengendalian internalnya serta melindungi harta instansi, menciptakan prosedur akuntansi yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penipuan, penyelewengan, penggelapan, pemborosan kas atau praktek-praktek

Muliyani, Julita br Silalahi

Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan

buruk lain yang bisa membuat kerugian di instansi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengendalian internal kas pada BPBD kota Medan.

Menurut Mulyadi, (2017) unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu:

- a. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- b. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- c. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.
- d. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

Diantara keempat unsur pengendalian tersebut, unsur mutu karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya merupakan unsur pengendalian yang paling penting. Karena apabila karyawan yang ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuannya maka seluruh aktivitas tidak akan berjalan lancar dan apa yang telah dilakukan tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, unsur manusia atau karyawan harus benar-benar ditempatkan sesuai dengan bidang dan kemampuannya serta memiliki tugas yang telah ditetapkan agar apa yang menjadi tujuan perusahaan

dapat tercapai dengan baik.

Menurut (Sujarweni, 2015) Sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik. Beberapa komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal adalah:
 - Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen, artinya di sini bahwa manajemen akan menegakkan peraturan. Jika yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas.
 - Struktur Organisasi. Metode pembagian tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan harus jelas dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Penaksiran Risiko. Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Ada tiga kelompok risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu:
 - Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah (misalnya: harusnya dikerjakan dengan komputer ternyata dikerjakan secara manual).
 - Risiko finansial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena uang hilang, dihambur- hamburkan, atau dicuri.
 - Risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya.
- c. Aktivitas Pengendalian. Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Committee of Sponsoring Organizations (COSO) mengidentifikasi setidaknya

Muliyani, Julita br Silalahi

Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan

tidaknya ada lima hal yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu:

- Pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat perusahaan.
 - Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan. Otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari atasan. Contoh: untuk meminta pergantian peralatan kantor maka bagian pembelian harus meminta persetujuan dari pimpinan dari bagian keuangan, persetujuan dari pimpinan keuangan itu dibuktikan dengan tanda tangan.
 - Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik. Dokumen sebaiknya mudah dipakai oleh karyawan, dokumen dibuat dengan bahan yang berkualitas agar bertahan lama jika disimpan.
 - Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan. Pemeriksaan kinerja ini dapat dilakukan dengan salah satu langkah yaitu membuat rekonsiliasi/pencocokan antara catatan perusahaan dengan bank, maupun rekonsiliasi antara dua catatan yang terpisah mengenai suatu rekening, melakukan stok opname yaitu mencocokkan jumlah unit persediaan di gudang dengan catatan persediaan dan menjumlah berbagai hitungan dengan cara batch totals, yaitu penjumlahan dari atas ke bawah.
 - Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan. Perlindungan yang ketat ini meliputi antara peccatat dan pembawa kas harus berbeda orangnya, tersedia tempat penyimpanan yang baik, pembatasan akses ruang-ruang yang penting.
- d. Merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal-hal berikut ini:
- Bagaimana transaksi diawali.
 - Bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap dimasukkan ke sistem komputer.
 - Bagaimana fail data dibaca, diorganisasi, dan diperbaharui isinya.
 - Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat

keputusan.

- Bagaimana informasi yang baik dilakukan.
 - Bagaimana transaksi berhasil.
- e. Pemantuan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan. Berbagai bentuk pemantuan di dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu atau semua proses berikut ini:
- Supervisi yang efektif, yaitu manajemen yang lebih atas dapat mengawasi manajemen dan karyawan di bawahnya.
 - Akuntansi pertanggungjawaban yaitu perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, masing-masing departemen, dan masing-masing proses yang dijalankan oleh perusahaan.
 - Audit internal yaitu pengauditan yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan.

Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data yang bersangkutan terhadap kejadian yang telah terjadi (Sugiyono, 2016). Lebih lanjut (Tanjung & Mulyani, 2021) metode kualitatif bersifat fleksibel atau bisa dimungkinkan untuk diubah menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, sesuai dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya.

Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode komperatif atau perbandingan dalam penarikan kesimpulannya. Yaitu membandingkan sistem pengendalian yang ada di BPBD Kota medan terhadap prinsip dan prosedur PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) apakah sistem yang diterapkan sudah sesuai ataupun belum, adapun Unsur SPIP tersebut terdiri atas:

- a. lingkungan pengendalian

Muliyani, Julita br Silalahi

Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan

- b. penilaian risiko
- c. kegiatan pengendalian
- d. informasi dan komunikasi
- e. pemantauan pengendalian internal.

Data penilaian tersebut ditampilkan dengan tabel, hasil analisis digunakan dalam bentuk perhitungan yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian dan diproses dengan cara dijumlahkan, kemudian dibandingkan kesesuaian antara unsur SPIP terhadap jawaban informan dan diperoleh persentase. Menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh Febryan, (2015) Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari informan, dilakukan analisis statistik dengan menggunakan rumus Dean J. Champion dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Poin}}{\text{Total pertanyaan (unsur SPIP)}} \times 100$$

Untuk keperluan interpretasi hasil perhitungan persentase, Champion mengemukakan bahwa nilai hasil dari perhitungan yang diperoleh, dideskripsikan dengan berdasarkan penilaian sebagai berikut:

0% - 20%	: SPIP Tidak Sesuai
21% - 60%	: SPIP Kurang Sesuai
61% - 80%	: SPIP Cukup Sesuai
81% - 100%	: SPIP Sangat Sesuai.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam menilai kesesuaian sistem pengendalian internal kas di BPBD terhadap Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), peneliti melakukan pembobotan kesesuaian unsur SPIP terhadap implementasi di BPBD Kota Medan. Pembobotan dilakukan dengan 5 unsur SPIP, jika pelaksanaan sesuai dengan unsur SPIP maka mendapatkan poin 1. Berikut penilaiannya:

Tabel 2. Hasil Wawancara

No.	Unsur SPIP	Hasil Wawancara	Sesuai (√) Tidak(x)
1	Lingkungan Pengendalian	hmm kalau dalam lingkungan pengendalian yang berhubungan dengan struktur organisasi di BPBD Kota Medan sih telah menerapkan struktur organisasi yang lumayan jelas, hm tetapi didalam hal pemisahan fungsi kas instansi ini tidak melaksanakan fungsi penerimaan kas, dan yg dipakai hanya fungsi pencatatan dan fungsi pengeluaran kas." Informan 1 (Staff Kesekretariatan)	(x)
2	Penilaian Risiko	ohh kalau dilakukan perubahan peraturan pada instansi ini sih dapat menghasilkan risiko yang berbeda. Hm tetapi kami dari pihak instansi mengupayakan sekuat mungkin supaya menanggulangi terjadinya risiko khususnya kas. Sebagai upaya dalam memberantas terjadinya resiko BPBD Kota Medan menerapkan: memposisikan pegawai sesuai dengan pendidikannya, semua dokumen dana data pendukung di cap "Lunas" setelah selesai dibayarkan transaksinya, dibagian arsip selalu mengecek dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran kas, telah tersediannya berangkas untuk penyimpanan uang tunai dan berkas-berkas penting, lalu seluruh nomor check yang keluar bagian keuangan yang bertanggung jawab Informan 2 (Kassubag Keuangan)	(√)
3	Kegiatan Pengendalian	Kegiatan pengendalian meliputi 1. Pelaksanaan review oh kalau soal itu sih telah dilaksanakannya a tinjauan ulang oleh kepala instansi yah walaupun tidak secara teratur setiap bulannya. Dan setiap pengeluaran kas telah dicata di Buku Kas Umum sesuai atau pas dengan klasifikasinya tak lupa disertai dokumen atau berkas pendukung lainnya." Informan 2 (Kassubag Keuangan) 2. Pengendalian Fisik hm kalau diinstansi ini sudah menyediakan lemari berangkas untuk penyimpanan seluruh uang tunai Serta dokumen-dokumen penting . Akan tetapi untuk sekarang ini instansi tidak memiliki uang tunai di berangkas, dikarenakan semua uang tersimpan di Bank oleh karena itu seluruh transaksi	(√)

Muliyani, Julita br Silalahi

Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan

		pengeluaran kas dilakukan melalui cara transfer." Informan 2 (Kasubbag Keuangan) 3.Pemisah Tugas hmm Sampai dengan sejauh ini sih instansi ini telah mempunyai pemisahan tugas dan fungsi secara bsesuai dan baik, trus bisa juga dilihat dari struktur organisasinya yang mencakup sub bagian yang telah ditunjuk sebagai pemimpin dan alhamdulillah semuanya berjalan secara baik." Informan 2 (Kassubag Keuangan)	
4		1. Menyusun dan mencatat transaksi yang sah Ohh kalau dibagian Keuangan sampai sejauh ini Mereka telah melakukan pencatatan dan penyusunan pada seluruh kegiatan transaksi yang sah semisal transaksi yang menggunakan bukti pendukung yang telah disesuaikan dengan waktu dilaksanakannya transaksi yang dicatat. Trus Kemudian hasil dari pekerjaannya akan diperiksa oleh kasubag keuangan. Supaya menghasilkan informasi yang tepat waktu. Informasi itu akan membantu pelaksanaannya pengendalian internal di instansi ini dan pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh pimpinan" Informan 2 (Kassubag Keuangan) 2. Mengklarifikasikan Transaksi Keuangan "ohh pada bagian pencatatan mereka sering kali tidak mencantumkan tanggal pada waktu pelaksanaan transaksi tersebut terjadi oleh karena itu waktu yang tercantum didalam kwitansi tersebut tidak selalu sesuai dengan buku pengeluaran kas. Tetapi selalu adanya nomor urut tercetak dapat membantu dalam pengarsipan serta dapat mempermudah saat pencatatan." Informan 2 (Kassubag Keuangan) 3. Komunikasi hmm adapun komuikasi yang ada di dalam instasi baik secara lisan berupa tindakan yang diperbuat oleh manajemen ataupun tulisan yang berupa pelaporan pertanggung jawaban telah dilaksanakan secara baik, terutama yang ada hubunganya terkait dengan kas, dan sehingga bisa mempermudah dalam pengendalian internal di BPBD Kota	(√)

		Medan. Bendahara di instansi ini selalu memohon persetujuan dari bagian keuangan saat proses mengeluarkan uang terjadi. Serta kemudian pada bagian keuangan selalu memeriksa secara rinci bukti-bukti transaksi dengan uang yang ada serta membuat laporan itu kepada bagian Kasubag Keuangan. Trus selanjutnya Kasubag Keuangan membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada pimpinan instansi." Informan 3 (Bendahara)	
5	Pemantauan	hmm kalau di instansi ini pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan bukan dilaksanakan oleh auditor seperti perusahaan lainnya, tetapi hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hm adapun tugasnya mereka adalah memeriksa file-file atau dokumen-dokumen dari transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan oleh instansi ini. Dan adapun pengawasan secara umum di instansi ini dilaksanakan secara langsung oleh pimpinan kepada tiap-tiap sub bagian yang ada di instansi ini yah walaupun tidak rutin dilakukan sih" Informan 4 (Subbag keuangan)	(√)

Tabel 2 mengungkapkan bahwa 4 poin sesuai dan hanya 1 poin yang tidak sesuai dengan unsur SPIP, dan adapun persentase yang diperoleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Rumus:
$$\text{Persentase} = \frac{\text{Poin Kesesuaian}}{\text{Total Unsur Pengendalian}} \times 100$$

$$= \frac{4}{5} \times 100$$

$$= 80 \%$$

Berdasarkan hasil penilaian di atas terdapat sebagian besar kesesuaian sistem pengendalian internal kas pada BPBD Kota Medan terhadap unsur-unsur SPIP yaitu sebesar 80%, yang dapat diartikan bahwa sistem pengendalian internal kas BPBD Kota Medan sudah berjalan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Terdapat 20% unsur yang belum sesuai yaitu terdapat pada poin kegiatan pengendalian, yang seharusnya menurut unsur SPIP pada kegiatan ini dilakukan

Muliyani, Julita br Silalahi

Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan

penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan tindakan mengatasi resiko secara efektif. Tetapi pelaksanaan kegiatan pengendalian di BPBD Kota Medan masih belum efektif untuk mengatasi resiko, bahwa mereka dalam hal pemisahan fungsi kas instansi ini tidak menerapkan fungsi penerimaan kas, yang digunakan hanya fungsi pencatatan dan fungsi pengeluaran, ini dikarenakan mereka beranggapan kas di instansi ini hanya bersumber dari APBD saja sehingga mereka tidak menerapkan fungsi penerimaan kas. Hal ini tidak efektif dan besar kemungkinan terjadinya penyelewangan kas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dinilai bahwasanya sistem pengendalian internal kas tahun 2017 s/d 2021 pada instansi ini belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pengendalian internal yang tertera pada PP No.60 Tahun 2008 tetapi kalau dinilai secara keseluruhan dari hasil observasi dan wawancara langsung hasilnya sudah sesuai.

Adanya sedikit kekurangan yaitu tidak memiliki pemisahan fungsi antara pengeluaran dan penerimaan kas. Informan mengungkapkan bahwa instansi ini hanya melaksanakan rotasi pengeluaran dana kas oleh karena itu tidak diperlukan adanya fungsi penerimaan kas dikarenakan sumber dari danayang masuk hanya diharapkan dari APBD saja. adapun dalam kegiatan pengawasan juga tidak sering dilaksanakan oleh pimpinan instansi tersebut. Dan adapun penerapan prosedur pengeluaran kas di BPBD Kota Medan telah baik dilaksanakan. dapat dinilai saat menanggulangi penyalahgunaan kas, yaitu pengeluaran wajib dilengkapi dengan dokumen yang telah ditandatangani oleh yang berwenang dan memenuhi tahapan yang ditetapkan oleh instansi.

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap sistem pengendalian internal kas tahun 2017 s/d 2021 pada BPBD Kota Medan dapat diambil kesimpulan bahwasanya:

- a. Bahwa pengeluaran kas dari tahun 2017 s/d 2021 diinstansi ini biasanya dipakai untuk biaya operasi dinas, dan biaya lainnya seperti rapat dan kegiatan lainnya, dibayar secara tunai maupun non tunai. Sistem

pengeluaran kas di instansi juga sudah berjalan baik dan sesuai dengan unsur SPIP, hal itu dinilai disetiap terjadinya pengeluaran kas di instansi ini wajib dibarengi dengan dokumen pendukung dan disertai dengan tanda tangan pimpinan atau pejabat yang berwenang sebelum diotorisasikan.

- b. BPBD Kota Medan telah memiliki suatu struktur organisasi yang jelas dan sesuai, didalamnya terdapat uraian tugas yang menerangkan tanggung jawab masing- masing dari setiap pekerja atau pegawai pada instansi ini agar memenuhi setiap peraturan yang ada pada. Instansi ini juga telah menerapkan atau melaksanakan pemisahan tugas yang baik dan tepat. tetapi instansi ini tidak mempunyai fungsi untuk penerimaan kas, hal ini dikarenakan mereka beranggapan sumber dana yang terdapat di instansi tersebut hanya berasal dari APBD saja
- c. Hasil dari analisis yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Informan yang terkait dengan sistem pengendalian internal kas yang bertujuan untuk melihat kesesuaian terhadap unsur-unsur sistem pengendalian internal yang ada di BPBD Kota Medan dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah yang terdapat pada PP No. 60 Tahun 2008, dari penghitungan data yang didapat hasilnya menunjukkan persentase hingga 80% yang artinya sistem pengendalian yang terdapat di instansi ini sudah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.

Daftar Pustaka

- Fanola, F. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Intern Kas pada PT. Bintika Bangun Nusa Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Febryan, R. (2015). Analisis Audit Operasional Dalam Proses Produksi (Studi Kasus Pada PT.Percetakan Manuntung Press Samarinda). EJournal Ilmu Administrasi Bisnis, 3, 911–922.
- Hikmah, N. (2018). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

Mulyani, Julita br Silalahi

Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan

Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kaligis, G. M. (2015). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).

Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.

Nariswari, R. (2018). Analisis Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Kas (Studi Kasus Pada R&B Restaurant). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press.

Tanjung, A. A., & Mulyani. (2021). *Metodologi Penelitian Sederhana, Ringkas, Padat dan Mudah Dipahami* (A. A. Tanjung & Mulyani (eds.)). Scopindo.